

**LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN I TAHUN 2026**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan dan Manfaat	4
1.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM	6
1.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB II ANALISIS DATA SKM	7
2.1 Analisis Responden	7
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	8
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	9
2.4 Tren Nilai SKM	11
BAB III HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	12
BAB IV KESIMPULAN	15
LAMPIRAN	16
1. Kuesioner	16
2. Dokumentasi terkait Pelaksanaan SKM (Foto Pelaksanaan SKM)	18
3. Lampiran Dokumentasi Kegiatan pada Realisasi Rencana Tindak Lanjut	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Metode Pengumpulan Data	5
Tabel 1.2 Waktu Pelaksanaan SKM	6
Tabel 1.3 Penentuan Jumlah Responden	6
Tabel 2.1 Analisis Responden	7
Tabel 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	8
Tabel 2.3 Rencana Tindak Lanjut	10
Tabel 3.1 Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)	12
Tabel 3.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

- Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
- Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;

- Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
- Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan menggunakan metode yang disesuaikan pada karakteristik setiap layanan untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode secara online demi menjangkau seluruh segmen pengguna layanan secara efektif. Rincian metode survei yang digunakan untuk setiap jenis layanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Metode Pengumpulan Data

No	Jenis Layanan	Metode Survei
1	Layanan Konsultasi PBG/SLF	online
2	Layanan Informasi Tata Ruang, SKKTR , dan KKPR	online

Instrumen survei yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang mengacu pada 9 (sembilan) unsur pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu:

- Persyaratan: Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk alur pengaduan.
- Waktu Penyelesaian: Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenisnya.
- Biaya/Tarif: Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara.
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Kompetensi Pelaksana: Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- Perilaku Pelaksana: Sikap dan tindakan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjutnya.

- Sarana dan Prasarana: Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilakukan secara periodik sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Periode pengumpulan data untuk laporan ini dilaksanakan selama TRIWULAN I TAHUN 2026 (2026). Keseluruhan proses, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan, memerlukan waktu selama 2 bulan. Rincian tahapan dan alokasi waktu kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Waktu Pelaksanaan SKM

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Persiapan	01 Jan 2026 - 31 Jan 2026	31
2	Pengumpulan Data	01 Feb 2026 - 13 Mar 2026	41
3	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	25 Mar 2026 - 27 Mar 2026	3
4	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	27 Mar 2026 - 31 Mar 2026	5

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden untuk setiap jenis layanan didasarkan pada populasi masing-masing. Untuk memastikan sampel yang diambil bersifat representatif, jumlah minimum responden ditetapkan menggunakan metode yang mengacu pada Tabel Krejcie dan Morgan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap layanan memiliki jumlah responden yang memadai secara statistik untuk menghasilkan data yang akurat. Rincian populasi dan target sampel minimum untuk setiap layanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Penentuan Jumlah Responden

No	Jenis Layanan	Jumlah Populasi	Sampel Minimum
1	Layanan Konsultasi PBG/SLF	30	28
2	Layanan Informasi Tata Ruang, SKKTR, dan KKPR	30	28
Total		60	56

BAB II ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Analisis terhadap karakteristik responden bertujuan untuk memahami latar belakang dan profil dari para pengguna layanan. Pada periode survei ini, data berhasil dikumpulkan dari total 64 responden. Profil demografis responden, yang mencakup aspek-aspek seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Analisis Responden

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	32	50%
		Perempuan	32	50%
2.	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/Sederajat	0	0%
		SMP/Sederajat	1	1.56%
		SMA/Sederajat	11	17.19%
		D1/D2/D3	8	12.5%
		D4/S1	39	60.94%
		S2	4	6.25%
		S3	1	1.56%
3.	Pekerjaan	ASN	17	26.56%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		Swasta	22	34.38%
		Wirausaha	13	20.31%
		Ibu Rumah Tangga	3	4.69%
		Pelajar/Mahasiswa	1	1.56%
		Petani/Nelayan	0	0%
		Pekerja Lepas/Freelance	2	3.13%
		Pensiunan	0	0%
		Lainnya	3	4.69%
	Perangkat Desa	3	4.69%	
4.	Kategori Pengguna Layanan	Non Disabilitas	64	100%
		Disabilitas	0	0%
5.	Kategori Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

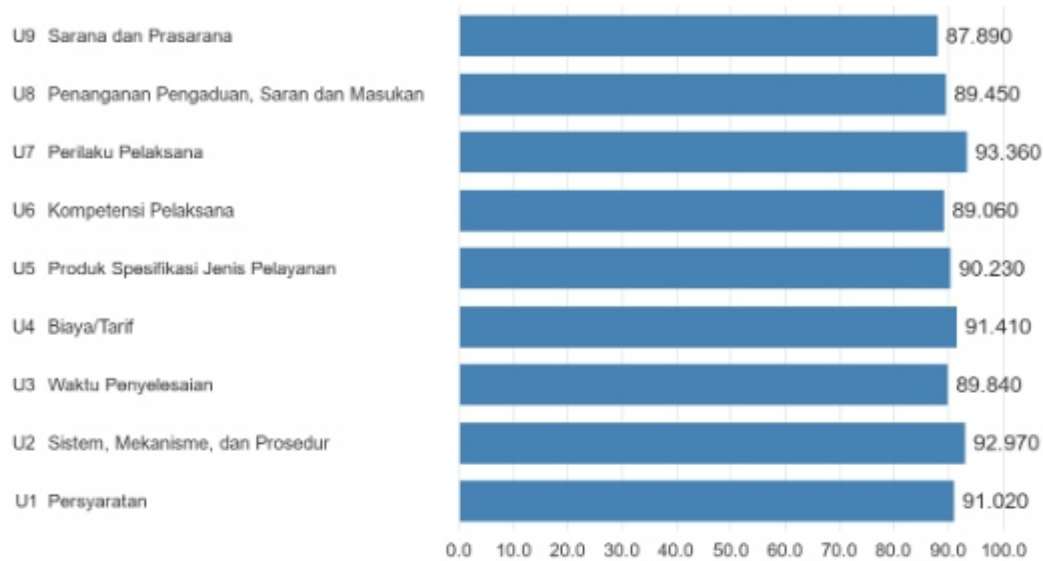
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

Setelah menganalisis profil responden, tahap selanjutnya adalah menyajikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara terperinci. Tabel berikut ini menguraikan capaian nilai IKM untuk setiap jenis layanan yang disurvei, beserta rincian nilai rata-rata untuk masing-masing dari sembilan unsur pelayanan.

Tabel 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1	Layanan Konsultasi PBG/SLF	30	90.83	94.17	89.17	94.17	90.83	88.33	93.33	87.50	85.00	90.36
2	Layanan Informasi Tata Ruang, SKKTR, dan KKPR	34	91.18	91.91	90.44	88.97	89.71	89.71	93.38	91.18	90.44	90.83
Rerata IKM Per Unsur			91.02	92.97	89.84	91.41	90.23	89.06	93.36	89.45	87.89	90.61
IKM Unit Layanan			90.61									
Mutu Unit Layanan			Sangat Baik (A)									

Grafik Nilai IKM Agregat per Unsur



Gambar 2.1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis data SKM, dapat diidentifikasi beberapa unsur pelayanan yang menjadi prioritas utama untuk perbaikan. Secara kuantitatif, unsur-unsur dengan nilai terendah adalah: Sarana dan Prasarana, Kompetensi Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Temuan ini sejalan dengan analisis kualitatif dari kritik dan saran yang diterima, dimana beberapa tema utama yang sering disorot oleh masyarakat antara lain:

- Sudah bagus, mohon ditingkatkan Kembali
- Pelayanan sangat memuaskan dan fast respon 🥰
- Bagus, mohon ditingkatkan dengan menambahkan kontak khusus untuk konsultasi
- Pertahankan pelayanan yang responsif dan on time
- Pelayanan lebih ditingkatkan lagi untuk kepuasan Masyarakat
- Ruangan dipercantik lagi, ac, untuk menunggu supaya nyaman
- Bagus dan jelas
- Pertahankan dan tingkatkan
- Lanjutkan dengan lebih baik
- Pertahankan pola dan system pelayan yg sudah sangat mendukung ini
- Arahannya jelas, sudah bagus
- Petugas pelayanan ramah dalam menjelaskan persyaratan PBG/SLF

- Petugas pelayanan bagus, kalau ada pemohon petugas lain tidak wira wiri mengganggu pemohon
- Wa admin mohon untuk lebih diaktifkan, pelayanan tatap muka bagus
- Dalam memberikan informasi jelas, petugas ramah
- Bagus dan tepat sasaran
- Pelayanan bagus supaya dipertahankan
- Tidak ada sudah baik semua
- Semangat untuk yang bertugas
- Semoga perizinan melalui online2 ini mudah dan cepat dan ramah buat wirausaha
- pelayanan yang diberikan sudah baik
- Sukses dpu sukoharjo
- Keluhan via wa Direspon dengan baik oleh Bu Kenida
- Semua sudah berjalan dengan baik
- Petugas responsif dalam memberikan informasi terkait surat edaran terbaru dalam perizinan
- Tingkatkan Selama sy mengurus ijin sktr sy dilayani petugas dg ramah, responsif dan selalu memberi penjelasan yg sangat membantu. terimakasih petugas sktr yg melayani sy.

Atas dasar temuan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai IKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama perbaikan adalah pada unsur-unsur yang telah diidentifikasi sebagai prioritas. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut adalah rencana tindak lanjut yang telah disusun untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang:

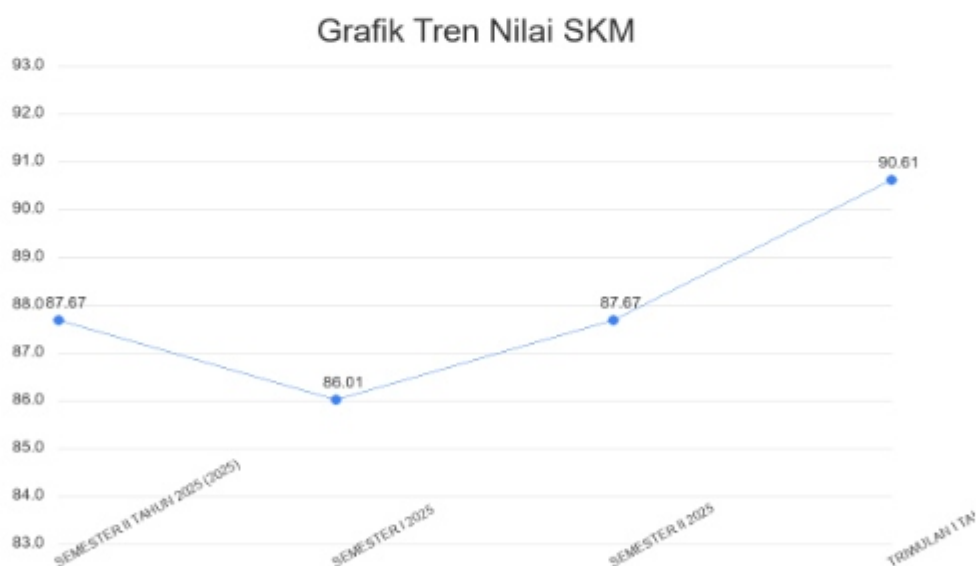
Tabel 2.3 Rencana Tindak Lanjut

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Sarana dan Prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana mendukung pelayanan publik	Desember 2026	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Kompetensi Pelaksana	Mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, seminar (zoom meeting) berkaitan	Desember 2026	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
		dengan Peraturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi, Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKKTR), dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)		Penataan Ruang
3	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Mengoptimalkan penanganan pengaduan, saran, dan masukan yang sudah ada	Juni 2026	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama beberapa periode terakhir dapat dilihat melalui grafik di bawah ini. Grafik ini menggabungkan data historis yang diarsipkan dengan data yang dihasilkan oleh sistem untuk memberikan gambaran yang komprehensif.



Gambar 2.2. Grafik Tren Nilai SKM

Berdasarkan grafik di atas, tren nilai SKM menunjukkan tren peningkatan yang positif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan yang berkelanjutan.

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode SEMESTER II TAHUN 2025 (2025) menunjukkan angka yang beragam pada berbagai unsur pelayanan, seperti dapat terlihat pada ringkasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	87.11
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	86.91
3	Waktu Penyelesaian	84.37
4	Biaya/Tarif	91.49
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	85.35
6	Kompetensi Pelaksana	87.43
7	Perilaku Pelaksana	89.49
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	89.79
9	Sarana dan Prasarana	87.10

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyusun dan menindaklanjuti rencana perbaikan berdasarkan temuan pada periode tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Waktu Penyelesaian	Menyusun sistem informasi tata ruang (SIMTARU) dan mengadakan klinik konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Belum (Sedang Berjalan) untuk SIMTARU, Konsultasi PBG (sudah)	Deskripsi: Telah dilakukan pentest untuk pengintegrasian SIMTARU, Sudah dilakukan klinik konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Hambatan: Proses hosting SIMTARU ke server Pemerintah Daerah terkendala beberapa hal terkait perbaikan hasil pentest dan proses integrasi lainnya dengan system aplikasi lainnya esiplah dan spion, Proses pengecekan persyaratan PBG dan SLF yang membutuhkan waktu	Terlampir
2	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Melakukan sosialisasi produk spesifikasi jenis pelayanan	Sudah	Deskripsi: Penjelasan produk di bidang tata ruang : Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKKTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Penjelasan produk di bidang cipta karya : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di sosial media instagram @tataruang sukoharjo @dpuprsukoharjo, website DPUPR (pupr.sukoharjokab.go.id)	Terlampir

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
				Hambatan: Masih banyak masyarakat yang tidak membuka sosial media terkait penjelasan produk jenis pelayanan di DPUPR	
3	Persyaratan	Melakukan sosialisasi prosedur pelayanan	Sudah	<p>Deskripsi: Penjelasan sosialisasi prosedur pelayanan di bidang tata ruang : Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKKTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Penjelasan sosialisasi prosedur pelayanan di bidang cipta karya : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di sosial media instagram @tataruang sukoharjo @dpuprsukoharjo, website DPUPR (pupr.sukoharjokab.go.id)</p> <p>Hambatan: Masih banyak masyarakat yang tidak membuka sosial media terkait penjelasan sosialisasi prosedur pelayanan di DPUPR</p>	Terlampir

BAB IV KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Januari s.d. Maret 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 64 orang mengisi SKM pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Dari beberapa layanan yang ada, Layanan Informasi Tata Ruang, SKKTR, dan KKPR menjadi layanan dengan pengguna terbanyak, terlihat dari jumlah responden yang mengisi survei yaitu 34 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas Sangat Baik (A) dengan nilai SKM 90.61. Meskipun demikian, nilai SKM menunjukkan pola yang stabil.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana dan Prasarana, Kompetensi Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 67% (2 dari 3 rencana).
- Masih terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti, yaitu: Menyusun sistem informasi tata ruang (SIMTARU) dan mengadakan klinik konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), karena Proses hosting SIMTARU ke server Pemerintah Daerah terkendala beberapa hal terkait perbaikan hasil pentest dan proses integrasi lainnya dengan system aplikasi lainnya esiplah dan spion, Proses pengecekan persyaratan PBG dan SLF yang membutuhkan waktu.

Sukoharjo, 27 Maret 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,



Bawa Sutopo D.A, ST.,MT

Pariwisata Utama Muda

NIP. 19690912 199803 1 007

LAMPIRAN

1. Kuesioner

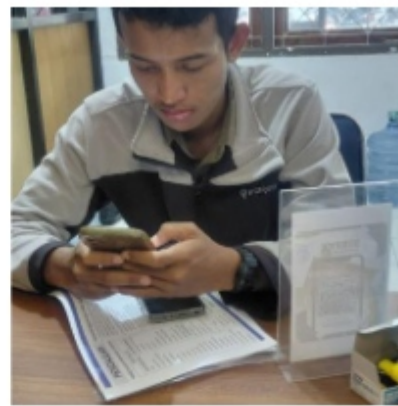
KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. IDENTITAS RESPONDEN			
Jenis Layanan:			
Tanggal Menerima Layanan:			
Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan			
Pendidikan: <input type="checkbox"/> Tidak Sekolah <input type="checkbox"/> SD/Sederajat <input type="checkbox"/> SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> D4/S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3		Usia: <input type="checkbox"/> < 17 tahun <input type="checkbox"/> 17-25 tahun <input type="checkbox"/> 26-34 tahun <input type="checkbox"/> 35-44 tahun <input type="checkbox"/> 45-54 tahun <input type="checkbox"/> 55-65 tahun <input type="checkbox"/> >65 tahun	
Pekerjaan: <input type="checkbox"/> ASN <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> POLRI	<input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Wirausaha <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <input type="checkbox"/> Petani/Nelayan <input type="checkbox"/> Pekerja Lepas/Freelance	<input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Lainnya _____
Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
Jika ya, jenis disabilitas apa yang Anda miliki/dampingi? (Jika tidak, lewati)			
<input type="checkbox"/> Disabilitas Fisik <input type="checkbox"/> Disabilitas Intelektual		<input type="checkbox"/> Disabilitas Mental <input type="checkbox"/> Disabilitas Sensorik	

A. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN	
<p>1. Persyaratan layanan diinformasikan dengan jelas dan mudah dipahami</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju 	<p>6. Petugas merespon kebutuhan dengan cepat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju
<p>2. Prosedur/Alur layanan mudah dipahami dan dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju 	<p>7. Petugas melayani saya dengan ramah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju
<p>3. Layanan yang diberikan sudah tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju 	<p>8. Layanan konsultasi dan pengaduan mudah diakses</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju
<p>4. Rincian biaya/tarif layanan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju 	<p>9. Sarana prasarana nyaman dan mudah digunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju
<p>5. Kualitas produk layanan yang diterima memuaskan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju 	

Kritik dan Saran:


2. Dokumentasi terkait Pelaksanaan SKM (Foto Pelaksanaan SKM)





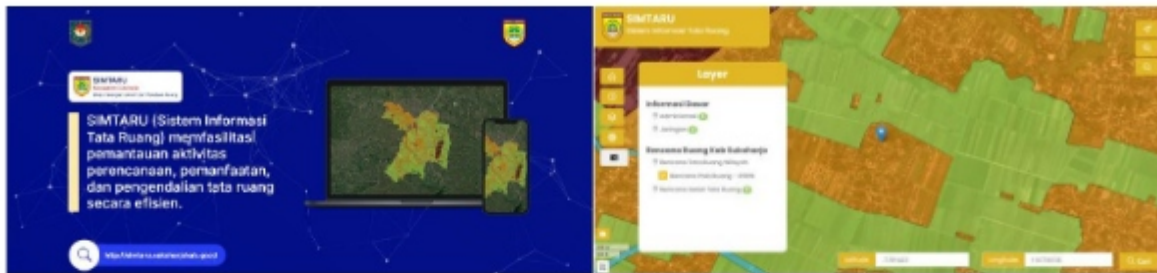
GPS Map Camera

Kecamatan Bendosari, Jawa Tengah, Indonesia

 Jl. Abu Tholib Sastrateno No.378, Gabusan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, Indonesia, Kecamatan Bendosari, Jawa Tengah 57521, Indonesia
Lat -7.665692° Long 110.83517°
Selasa, 10/03/2026 10:47 AM GMT +07:00

Google

3. Lampiran Dokumentasi Kegiatan pada Realisasi Rencana Tindak Lanjut
Proses Tahapan Pentest SIMTARU untuk pengintegrasian SIMTARU



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung Menara Wijaya Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57521,
Telepon (0271) 593068 Sukoharjo Ext. 1522, Faksimile (0271)593335,
Laman: www.diskominfo.sukohariokab.go.id Pos-el: diskominfo@sukohariokab.go.id



**Laporan *Penetration Test* Diskominfo Sukoharjo Pada
Website SIMTARU Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang
Kabupaten Sukoharjo**

Disusun Oleh :
[Rizal Taufiq Hidayat]

Klinik Konsultasi PBG



Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan Persyaratan

13.54 25% 17%
Postingan
10 Juli
tataruangsukoharjo

13.54 25% 17%
Postingan
tataruangsukoharjo

ALUR PENDAFTARAN KKPH NONBERUSAHA MELALUI SPION

ALUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KESESUAIAN TATA RUANG (SKKTR) MELALUI SPION

tataruangsukoharjo Alur pendaftaran KKPH (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Non Berusaha melalui SPION (Sistem Pelayanan Izin Online) Kabupaten Sukoharjo

tataruangsukoharjo Alur permohonan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKKTR) melalui SPION



SAHABAT-PBG



[Lihat Berkas & Download](#)


Guna mendukung implementasi penyelenggaraan bangunan gedung secara nasional sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

13.43

Postingan

 dpuprsukoharjo

 25 Agustus 2025



Untuk memperoleh Video Tutorial dan E-Book Panduan Pengurusan Perizinan Bangunan Gedung (PBG)

12 likes

 1 comment

 2 shares

Disukai oleh [alwanlatief](#) dan [lainnya](#)

 dpuprsukoharjo Halo Sobat! sudahkah Sobat tahu cara mengurus Perizinan Bangunan Gedung (PBG) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)?


 Yuk simak alur proses pengajuannya.







 Beri masukan Sobat untuk meningkatkan pelayanan PBG.

[#SAHABATPBG](#)
[#PBG](#)
[#simbg](#)

Layanan DPUPR

 Informasi terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



- 
Website DPUPR Sukoharjo
- 
Aduan melalui Direct Message
- 
CS SIMBG Sukoharjo
- 
Website SIMBG
- 
Persewaan Alat Berat
- 
Facebook DPUPR Sukoharjo